

Tren Riset Pelanggaran HAM Berat: Analisis Bibliometrik dan Agenda Riset Masa Depan *(Gross Human Rights Violations Research Trend: A Bibliometric Analysis and Future of Research Agenda)*

Iwan Santoso, Murtir Jeddawi, Yana Sahyana, Romli Arsyad, Alma'arif*

Program Pasca Sarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta

✉ almaarif@ipdn.ac.id

ABSTRACT: This study aims to analyze research trends related to human rights, identify countries, organizations, and authors who contribute significantly to the aforementioned research. Furthermore, this paper identifies related articles that strongly influence these scientific publications. VosViewer collects data from Scopus Database Journal and analyzes it using bibliometric analysis. As a result of the study, the United States has the highest number of publications. Furthermore, the Department of Epidemiology at the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health in Baltimore, Maryland, is the organization that has focused the most attention and influence on the issue of resolving gross human rights violations. In addition to the foregoing, Professor C. Beyrer of the United States is the most prolific and influential researcher on the topic of resolving gross human rights violations. Bibliometric analysis and content analysis show that the trend of resolving gross human rights violations in several countries since 2015 has been more toward resolution with non-judicial mechanisms. However, the results of the research show that several relevant articles do not provide a clear definition of gross human rights violations. Therefore, further research from other databases, such as the Web of Science, is required.

ABSTRAK: Studi ini bertujuan untuk menganalisis tren penelitian terkait hak asasi manusia, mengidentifikasi negara, organisasi, dan penulis yang berkontribusi signifikan terhadap penelitian tersebut. Selanjutnya, tulisan ini mengidentifikasi artikel-artikel terkait yang berpengaruh kuat terhadap publikasi ilmiah tersebut. VosViewer mengumpulkan data dari Database Journal Scopus dan menganalisisnya menggunakan analisis bibliometrik. Penelitian tersebut menunjukkan Amerika Serikat memiliki jumlah publikasi tertinggi. Selanjutnya, Departemen Epidemiologi di Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health di Baltimore, Maryland, adalah organisasi yang paling memusatkan perhatian dan pengaruhnya pada masalah penyelesaian pelanggaran HAM berat. Selain itu, Profesor C. Beyrer dari Amerika Serikat adalah peneliti paling produktif dan berpengaruh dalam topik penyelesaian pelanggaran HAM berat. Analisis bibliometrik dan analisis isi menunjukkan bahwa kecenderungan penyelesaian pelanggaran HAM berat di beberapa negara sejak tahun 2015 lebih mengarah pada penyelesaian dengan mekanisme non-yudisial. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa pasal yang relevan tidak memberikan definisi yang jelas tentang pelanggaran HAM berat. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut dari database lain, seperti Web of Science.

Keywords:

bibliometric analysis;
collaborative governance;
content analysis;
gross human rights violation;
multi-stakeholder governance

Kata Kunci:

analisis bibliometrik;
analisis isi;
pelanggaran HAM berat;
tata kelola kolaboratif;
tata kelola multi-stakeholder

Diserahkan/Submitted:

02-03-2023

Diterima/Accepted:

28-04-2023

Cara Mengutip/How to cite:

Santoso, Iwan, et.al. "Gross Human Rights Violations Research Trend: A Bibliometric Analysis and Future of Research Agenda". *Jurnal HAM*. Vol. 14 No. 1, April 2023, 69-90. DOI. 10.30641/ham.2023.14.69-90

Hak Cipta/Copyrights (c) 2023

Iwan Santoso, Murtir Jeddawi, Yana Sahyana, Romli Arsyad, Alma'arif

1. Pengantar

Sejak tahun 2018, Indonesia telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam publikasi penelitian ilmiahnya, termasuk jurnal, konferensi makalah, dan prosiding, mengungguli Malaysia dan Iran (Elango & Oh, 2022). Pada tahun 2008, hanya empat artikel jurnal yang diterbitkan di dalam negeri, yang kemudian meningkat secara signifikan menjadi 79 pada tahun 2017. Publikasi konferensi makalah juga menunjukkan tren yang positif, meningkat dari tidak ada menjadi 44 publikasi¹. Tren serupa juga diamati dalam basis data Scimago, yang mengungkapkan bahwa publikasi Indonesia di semua subjek menunjukkan pertumbuhan positif dari tahun 2000 hingga 2020².

Banyaknya publikasi dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi dasar bagi para peneliti untuk melakukan kajian pada subjek tertentu dengan menggunakan analisis bibliometrik. Pertama, penelitian bibliometrik mengkaji kesehatan dan hak asasi manusia³. Kedua, penelitian terkait terorisme dan hak asasi manusia⁴. Ketiga, terkait dengan penyalahgunaan lahan⁵ dan kenyamanan dalam pariwisata⁶. Secara lebih spesifik, analisis bibliometrik mengkaji kecenderungan dan penyelesaian permasalahan hak asasi manusia terkait dengan kesehatan⁷ dan transgender⁸ dalam 150 tahun terakhir (1900-2017).

Kajian tentang hak asasi manusia saat ini memperluas fokus mereka. Permasalahan hak asasi manusia berkisar dari penegakan hukum⁹, peran CSR dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi masyarakat yang terdampak¹⁰, dan peran negara dalam peningkatan kesehatan masyarakat¹¹. Sedangkan penelitian pelanggaran

- 1 Rochman Achwan et al., "University Reform and the Development of Social Sciences in Indonesia," *International Journal of Educational Development* 78, no. August (2020): 102269, <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2020.102269>.
- 2 Prakoso Bhairawa Putera et al., "A Bibliometric Analysis of Articles on Innovation Systems in Scopus Journals Written by Authors from Indonesia, Singapore, and Malaysia," *Science Editing* 7, no. 2 (2020): 177–83, <https://doi.org/https://doi.org/10.6087/kcse.214>.
- 3 Waleed M Sweileh, "A Bibliometric Analysis of Global Research Output on Health and Human Rights (1900 – 2017)," *Global Health Research and Policy* 3, no. 30 (2018): 1–10, <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s41256-018-0085-8>; Waleed M Sweileh, "Bibliometric Analysis of Peer-Reviewed Literature in Transgender Health (1900 – 2017)," *BMC International Health and Human Rights* 18, no. 16 (2018): 1–11, <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12914-018-0155-5>.
- 4 Fayaz Ahmad Loan and Refhatunnisa Shah, "Research Output on Terrorism by India and Pakistan : A Bibliometric Study," *Collection and Curation*, 2017, <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/CC-01-2017-0004>; Priscilla Paola Severo et al., "Thirty Years of Human Rights Study in the Web of Science Database (1990 – 2020)," 2021.
- 5 Marii Rasva and Evelin Jürgenson, "Europe ' s Large-Scale Land Acquisitions and Bibliometric Analysis," 2022.
- 6 Huiru Li et al., "Research Progress and Future Agenda of COVID-19 in Tourism and Hospitality : A Timely Bibliometric Review," no. 2019 (2022), <https://doi.org/10.1108/IJCHM-04-2022-0424>.
- 7 Sweileh, "A Bibliometric Analysis of Global Research Output on Health and Human Rights (1900 – 2017)."
- 8 Sweileh, "Bibliometric Analysis of Peer-Reviewed Literature in Transgender Health (1900 – 2017)."
- 9 Monika Heupel, "With Power Comes Responsibility: Human Rights Protection in United Nations Sanctions Policy," *European Journal of International Relations* 19, no. 4 (2013): 773–96, <https://doi.org/10.1177/1354066111426621>.
- 10 Daniel Augenstein, "Negotiating the Hard/Soft Law Divide in Business and Human Rights: The Implementation of the UNGPs in the European Union," *Global Policy* 9, no. 2 (2018): 254–63, <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12530>; Grace A. Ballor and Aydin B. Yildirim, "Multinational Corporations and the Politics of International Trade in Multidisciplinary Perspective," *Business and Politics* 22, no. 4 (2020): 573–86, <https://doi.org/10.1017/bap.2020.14>; Uwafiokun Idemudia and Cynthia Kwakyewah, "Analysis of the Canadian National Corporate Social Responsibility Strategy: Insights and Implications," *Corporate Social Responsibility and Environmental Management* 25, no. 5 (2018): 928–38, <https://doi.org/10.1002/csr.1509>; Anna F.S. Russell, *Incorporating Social Rights in Development: Transnational Corporations and the Right to Water*, *International Journal of Law in Context*, vol. 7, 2011, <https://doi.org/10.1017/S1744552310000388>.
- 11 Chris Beyrer et al., "Neglected Diseases, Civil Conflicts, and the Right to Health," *Lancet* 370, no. August 2018 (2007): 521–27; Monica Malta and Chris Beyrer, "The HIV Epidemic and Human Rights Violations in Brazil," *Journal of the International AIDS Society* 16, no. March (2013): 10–12, <https://doi.org/10.7448/IAS.16.1.18817>; Enrico Partiti and Steffen van Der Velde, "Curbing Supply-Chain Human Rights Violations through Trade and Due Diligence. Possible WTO Concerns Raised by the EU Conflict Minerals Regulation," *Journal of World Trade* 51, no. 6 (2017): 1043–68; Penelope Simons, "Selectivity in Law-Making: Regulating Extraterritorial Environmental Harm and Human Rights Violations by Transnational Extractive Corporations," in *Research Handbook on Human Rights and the Environment*, 2015, 473–507, <https://doi.org/10.4337/9781782544432.00034>.

hak asasi manusia berat di Indonesia masih berkaitan dengan penegakan peraturan¹² dan analisis hukum terhadap substansi peraturan¹³, telah ditemukan penelitian terbatas yang mengkaji kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia berat yang ada di Indonesia, termasuk tata kelola penanganannya. Namun demikian, penelitian sebelumnya tidak menyebutkan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat yang dalam konteks Indonesia belum diselesaikan melalui mekanisme pengadilan.

Pelanggaran hak asasi manusia berat adalah istilah yang rumit. Pelanggaran hak asasi manusia melibatkan pengingkaran terhadap hak moral dasar manusia. Misalnya, pelanggaran kebebasan berpikir dan bergerak adalah hak semua manusia secara hukum¹⁴. Sebaliknya, pelanggaran hak asasi manusia berat bersifat sangat serius karena parahnya kejahatan yang terlibat¹⁵. Penganiayaan, tindakan sewenang-wenang, dan pengurungan yang berlarut-larut adalah contoh pelanggaran berskala besar dengan karakter yang mengerikan¹⁶. Definisi lengkap pelanggaran hak asasi manusia berat, termasuk penganiayaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat, eksekusi yang sewenang-wenang dan tindakan sewenang-wenang, penghilangan, penahanan sewenang-wenang, segala bentuk rasisme, diskriminasi rasial dan apartheid, pendudukan asing, dan dominasi asing, xenophobia, kemiskinan, kelaparan dan penolakan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya lainnya, intoleransi beragama, terorisme, diskriminasi terhadap perempuan dan kurangnya supremasi hukum¹⁷. Salah satunya peraturan di Indonesia yang mendefinisikan pelanggaran hak asasi manusia berat adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pasal 7 undang-undang tersebut menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia berat meliputi genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan¹⁸. Genosida, dalam Pasal 8, didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan semua atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama dengan membunuh anggota kelompok, menyebabkan penderitaan fisik atau mental yang berat, menciptakan kondisi kehidupan bagi suatu kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik sebagian maupun keseluruhan, memaksakan tindakan yang bertujuan untuk mencegah kelahiran di dalam kelompok tersebut, atau memindahkan secara paksa anak dari satu kelompok ke kelompok lain. Sedangkan pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan yang dijelaskan dalam Pasal 9 adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis, yang ditujukan langsung terhadap penduduk sipil. Tindakan tersebut dapat berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan paksa penduduk, perampasan kebebasan atau perampasan kebebasan fisik lainnya secara sewenang-wenang, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran paksa, kehamilan paksa, sterilisasi atau sterilisasi paksa. Selain itu, bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan terhadap kelompok tertentu, penghilangan paksa, atau kejahatan apartheid juga termasuk di dalamnya.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menyajikan tren penelitian yang meneliti permasalahan-permasalahan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat hingga tahun 2022. Kajian ini akan menjawab beberapa pertanyaan penelitian, antara lain:

- (1) Apa tren penelitian terkait pelanggaran hak asasi manusia berat?
- (2) Bagaimana kecenderungan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat?

Temuan kajian ini dimaksudkan untuk membantu para akademisi hak asasi manusia, dan para praktisi untuk menggali tema-tema yang relevan dengan hak asasi manusia yang masih kontekstual dan jarang dilakukan.

12 Abdul Haris Samendawai, "Rights of Gross Human Rights Violation Victims (International and National Law Perspective)," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 16, no. 2 (2009), <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/537>.

13 Bernhard Ruben Fritz Sumigar, "Pelanggaran Berat HAM Dalam RUU KUHP: Tinjauan Dari Hukum Internasional (Gross Violations of Human Rights in the Criminal Code Bill: An Overview from International Law)," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 11, no. 2 (2020): 125–44, <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1639>.

14 Simon Ekpa, "Human Rights Violation" (SSRN, 2016), <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2738447>.

15 E Hariharan and S Tharika, "Gross Human Rights Violation-The Enforcement Challenge," *International Journal of Law Management & Humanities* 1, no. 5 (2018): 2581–5369, www.ijlmh.com.

16 Roger-Claude Liwanga, "The Meaning of Gross Violation of Human Rights: A Focus on International Tribunals' Decisions over the DRC Conflicts," *Denver Journal of International Law & Policy* 44, no. 1 (2015): 67–81.

17 WCHR, "World Conference on Human Rights, Vienna Declaration and Programme of Action" (Vienna, 1993).

18 Samendawai, "Rights of Gross Human Rights Violation Victims (International and National Law Perspective)."

2. Metode

Penelitian ini menggunakan analisis konten dan bibliometrik, suatu metode analisis untuk mengidentifikasi secara komprehensif artikel yang terkait dengan tema tertentu¹⁹. Sementara itu, analisis konten merupakan metode penelitian yang digunakan untuk membuat kesimpulan yang dapat direplikasi dan divalidasi dari teks dalam konteks penggunaannya²⁰. Data dikumpulkan menggunakan mesin pencari basis data Scopus dengan akses data terakhir pada tanggal 9 Desember 2022. Scopus merupakan basis data terbesar dan terlengkap²¹. Selain itu, Scopus juga merupakan basis data yang paling banyak digunakan dalam kajian bibliometrik²². Basis data dipilih untuk tambang data dengan mempertimbangkan artikelnya yang berkualitas tinggi dan bereputasi baik²³. Prosedur Boolean digunakan untuk menentukan kata kunci dan strategi dengan pertanyaan TITLE-ABS-KEY (“pelanggaran hak asasi manusia berat” ATAU “pelanggaran hak asasi manusia”) DAN (“manajemen” ATAU “tata kelola”)) dan beberapa kriteria inklusi dalam Basis data scopus.

Tabel 1. Strategi pemilihan makalah

Kriteria Inklusi	Aspek	Jumlah
Tahun	Sampai 9 Desember 2022	359
Akses Terbuka	Semua akses terbuka	337
Jenis dokumen	Artikel	329
Jenis sumber	Jurnal	324
Tahap publikasi	Final	323
Bahasa	Inggris	323

Sumber: dikelola oleh penulis, 2023.

Proses ini menghasilkan 323 artikel terkait. Selain itu, analisis bibliometrik dilakukan dengan menggunakan: co-authorship dengan unit analisis berdasarkan negara dan penulis; kejadian bersama dengan kata kunci penulis; kutipan berdasarkan dokumen dan sumber; dan rangkaian bibliografi dengan rekaman, sumber, penulis, dan negara. Aplikasi VosViewer versi 1.6.17 digunakan untuk analisis bibliometrik ini. Ini adalah aplikasi untuk menampilkan hasil dan menggambar peta visual bibliometrik dengan data unik²⁴. Sementara itu, analisis konten digunakan untuk menganalisis potensi penerapan tata kelola kolaboratif dalam penanganan pelanggaran hak asasi manusia berat yang dipraktikkan di beberapa negara berdasarkan tren yang ada.

19 Ida Hamidah, Sriyono, and Muhammad Nur Hudha, “A Bibliometric Analysis of Covid-19 Research Using VosViewer,” *Indonesia Journal of Science & Technology* 5, no. 2 (2020): 209–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/ijost.v5i2.24522>.

20 Yanuar Luqman, “Content Analysis on Energy Issue in Kompas Daily,” *Komunikator* 11, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.18196/jkm.111020>.

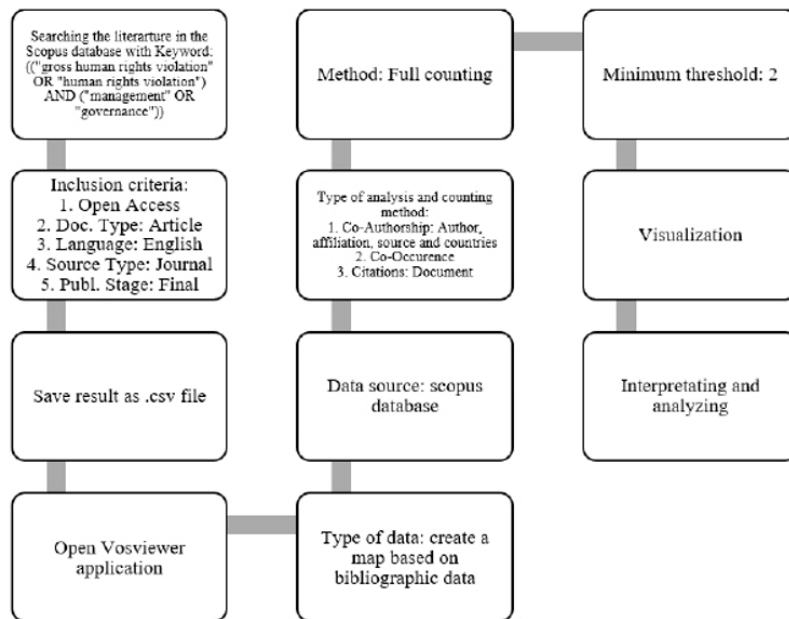
21 Jeroen Baas et al., “Scopus as a Curated, High-Quality Bibliometric Data Source for Academic Research in Quantitative Science Studies,” *Quantitative Science Studies* 1, no. 1 (2020): 377–86, https://doi.org/10.1162/qss_a_00019.

22 Waleed M. Sweileh et al., “Bibliometric Analysis of Publications on Campylobacter: (2000-2015),” *Journal of Health, Population, and Nutrition* 35, no. 1 (2016): 35–39, <https://doi.org/10.1186/s41043-016-0076-7>. Kami melakukan peninjauan bibliometrik publikasi tentang Campylobacter ini. Kajian ini dapat digunakan untuk menilai sejauh mana interaksi dan respon peneliti, regulator pangan, dan pembuat kebijakan kesehatan terhadap beban global campylobacteriosis. METODE: Database Scopus digunakan untuk mengambil publikasi dengan kata kunci berikut (Campylobacter/campylobacteriosis, C. jejuni, C. coli

23 “Discover Why the World’s Leading Researchers and Organizations Choose Scopus,” Elsevier, 2022, <https://www.elsevier.com/solutions/scopus/why-choose-scopus#:~:text=Scopus helps%3A,bolster performance%2C rank%2C and reputation.>

24 Nees Jan van Eck and Ludo Waltman, “Software Survey : VosViewer, a Computer Program for Bibliometric Mapping,” *Scientometrics*, no. 84 (2010): 523–38, <https://doi.org/10.1007/s11192-009-0146-3>.

Gambar 1. Tahapan Analisis Bibliometrik menggunakan VosViewer



Sumber: dikelola oleh penulis, 2023.

Pada Gambar 1, langkah satu sampai tiga berkaitan dengan pencarian artikel menggunakan kata kunci di basis data Scopus, sedangkan langkah empat sampai sembilan berkaitan dengan visualisasi menggunakan VosViewer. Sedangkan pada tahap akhir, peneliti menganalisis hasil dan bekerja sama dalam analisis jaringan.²⁵

Tabel 2. Metode dan aplikasi analisis data

Pertanyaan Penelitian	Analisis Konten	Teknik Bibliometrik	Aplikasi Bibliometrik
Tren publikasi (informasi utama)	Tidak	Analisis kutipan	VosViewer
RQ1: Tren penelitian apa yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia berat?	Ya	Analisis dan visualisasi kutipan bersama dinamis	VosViewer
RQ2: Bagaimana kecenderungan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat?	Ya	Visualisasi dan rangkaian bibliografi	VosViewer

Sumber: dikelola oleh penulis, 2023.

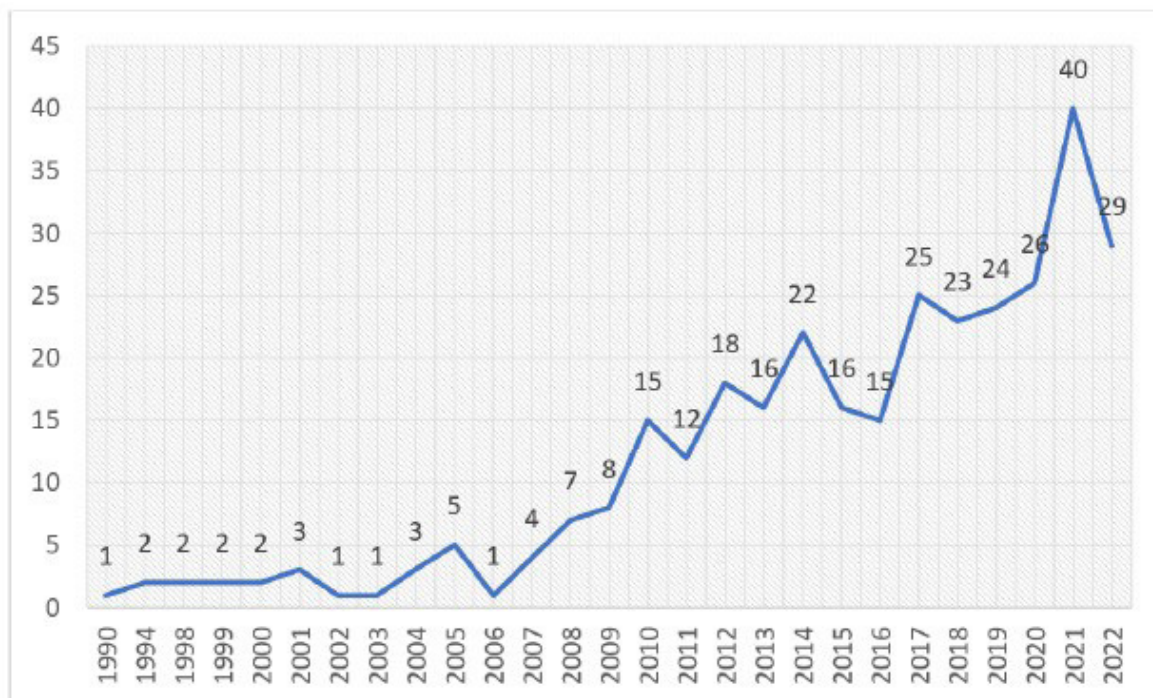
3. Temuan dan Pembahasan

3.1 Tren Publikasi Terkait Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat

Basis data Scopus memiliki 323 publikasi hasil penelitian mengenai pelanggaran hak asasi manusia berat (terdiri dari artikel jurnal, konferensi, buku, tinjauan buku, dan bab buku). Sebagian besar penelitian, sebanyak 40 artikel, diterbitkan pada tahun 2021-2022. Sedangkan jumlah artikel paling sedikit yaitu satu artikel yang diterbitkan pada tahun 1990, 2002, 2003, dan 2006. Mengacu pada grafik 1, peningkatan tertinggi karya terbitan dengan topik pelanggaran hak asasi manusia berat terjadi antara tahun 2020. (26 artikel) hingga 2021 (40 artikel).

²⁵ Ida Widianingsih et al., "Evolutionary Study of Watershed Governance Research: A Bibliometric Analysis," *Science and Technology Libraries* 40, no. 4 (2021): 416–34, <https://doi.org/10.1080/0194262X.2021.1926401>.

Grafik 1. Tren Penelitian Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat



Sumber: scopus.com

3.1.1 Negara Publikasi yang Berpengaruh

Penulis dari 63 negara berbeda menghasilkan 290 publikasi yang dijadikan topik penelitian. Daftar 12 negara dengan publikasi yang mengutip “pelanggaran berat hak asasi manusia” adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 12 Negara Teratas Dengan Publikasi yang Mengutip “Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia”

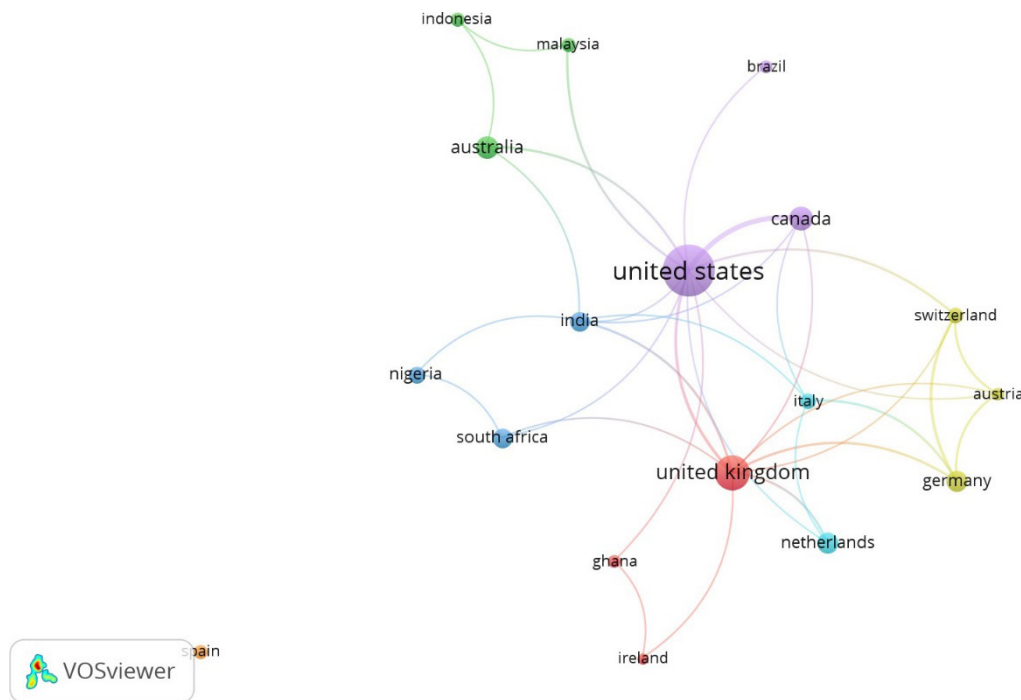
Peringkat	Negara	Dokumen (A)	Kutipan (C)	C/A
1	Amerika Serikat	91	1480	16,2637
2	Britania Raya	44	501	11,3864
3	Kanada	21	585	27,8571
4	Australia	17	131	7,7059
5	Jerman	15	203	13,5333
6	Belanda	15	114	7,6
7	Afrika Selatan	14	37	2,6429
8	India	13	39	3
9	Nigeria	10	11	1,1
10	Italia	9	26	2,8889
11	Swiss	9	96	10,6667
12	Indonesia	7	11	1,5714

Sumber: Analisis Data VosViewer, diproses oleh penulis, 2022.

Tabel 3 menunjukkan bahwa Amerika Serikat memiliki publikasi dan kutipan terbanyak di antara 12 negara, dengan 91 artikel dan 1.480 kutipan. Inggris, Kanada, dan Australia menempati urutan kedua hingga keempat sebagai negara dengan publikasi terbanyak. Sedangkan dari segi jumlah karya yang dikutip, peringkat kedua hingga keempat terdiri dari Kanada, Inggris, dan Jerman. Peringkat enam hingga dua belas kuantitas publikasi terdiri dari Belanda, Afrika Selatan, India, Nigeria, Italia, Swiss, dan India. Sehubungan dengan jumlah karya yang dikutip, Swiss, India, Afrika Selatan, Italia, Nigeria, dan India, menempati urutan keenam hingga

dua belas. Beberapa negara dengan publikasi dan kutipan tersebut memiliki keterkaitan dalam hal kerjasama internasional yang menghasilkan 18 negara kerjasama. Amerika Serikat memiliki negara yang paling produktif karena Amerika Serikat adalah negara pertama yang menginternasionalkan permasalahan-permasalahan hak asasi manusia²⁶, dan beberapa kasus dan jenis pelanggaran hak asasi manusia terjadi di Amerika Serikat²⁷. Tabel 3 juga menunjukkan bahwa 5 negara teratas yang menerbitkan artikel hak asasi manusia adalah negara-negara Anglo-Saxon. Hal ini dikarenakan negara-negara Anglo-Saxon sangat mendukung hak dan kebebasan individu²⁸.

Gambar 2. Visualisasi Jaringan Negara Paling Produktif Menerbitkan “Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat”



Sumber: diproses oleh penulis, 2022

3.1.2 Jurnal Publikasi yang Berpengaruh

Terdapat kesenjangan yang mencolok di antara sumber publikasi mengenai artikel dan kuantitas kutipan. Journal of Social Science and Medicine menempati urutan pertama sebagai yang paling banyak dikutip, dengan 97 kutipan. Pasalnya, tema yang dibahas dalam jurnal tersebut adalah permasalahan kesehatan dan sosial, seperti proses dan implementasi kebijakan kesehatan dan sosial. World Development Journal menempati urutan kedua dengan 59 kutipan, disusul oleh Human Rights Quarterly Journal yang menempati urutan ketiga dengan 58 kutipan. Sehubungan dengan jumlah artikel, Health and Human Rights Journal, Human Rights Quarterly Journal, dan Marine Policy Journal menempati peringkat pertama bersamaan dengan empat artikel yang diterbitkan. Pada saat yang sama, African Security Review-Journal, International Journal of Environmental Research and Public Health, dan Political Research Quarterly Journal menempati peringkat kedua dengan tiga artikel yang diterbitkan.

**Tabel 4. 12 Teratas Jurnal “Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia”
Berdasarkan Jumlah Artikel**

Peringkat	Nama Jurnal/Buku	Dokumen (A)	Kutipan (C)	C/A
1	Health And Human Rights	4	19	4,75

- 26 Gillian MacNaughton and Mariah McGill, “Economic and Social Rights in the United States : Implementation Without Ratification Universal Declaration of Human Rights , Which Has since Become,” *Northeastern University Law Journal* 4, no. 2 (2012): 365–406.
- 27 Xinhua, “The Report on Human Rights Violations in the United States in 2021,” SCIO Republic of China, 2022, http://english.scio.gov.cn/m/scionews/2022-02/28/content_78076572.htm.
- 28 Mukti Ali, “Perbandingan Konsep Negara Hukum,” *Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian*, 2020, 1–32.

Peringkat	Nama Jurnal/Buku	Dokumen (A)	Kutipan (C)	C/A
2	Human Rights Quarterly	4	58	14,5
3	Marine Policy	4	47	11,75
4	African Security Review	3	2	0,6667
5	International Journal of Environmental Research and Public Health	3	2	0,6667
6	Political Research Quarterly	3	9	3
7	Advances In Intelligent Systems and Computing	2	3	1,5
8	Epidemiology And Psychiatric Sciences	2	32	16
9	Global Health Action	2	16	8
10	International Community Law Review	2	1	0,5
11	International Journal of Drug Policy	2	28	14
12	International Journal of Human Rights in Healthcare	2	0	0

Sumber: scopus.com, 2022.

Tabel 5. 12 Teratas Jurnal “Penyelesaian Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia” Berdasarkan Jumlah Kutipan

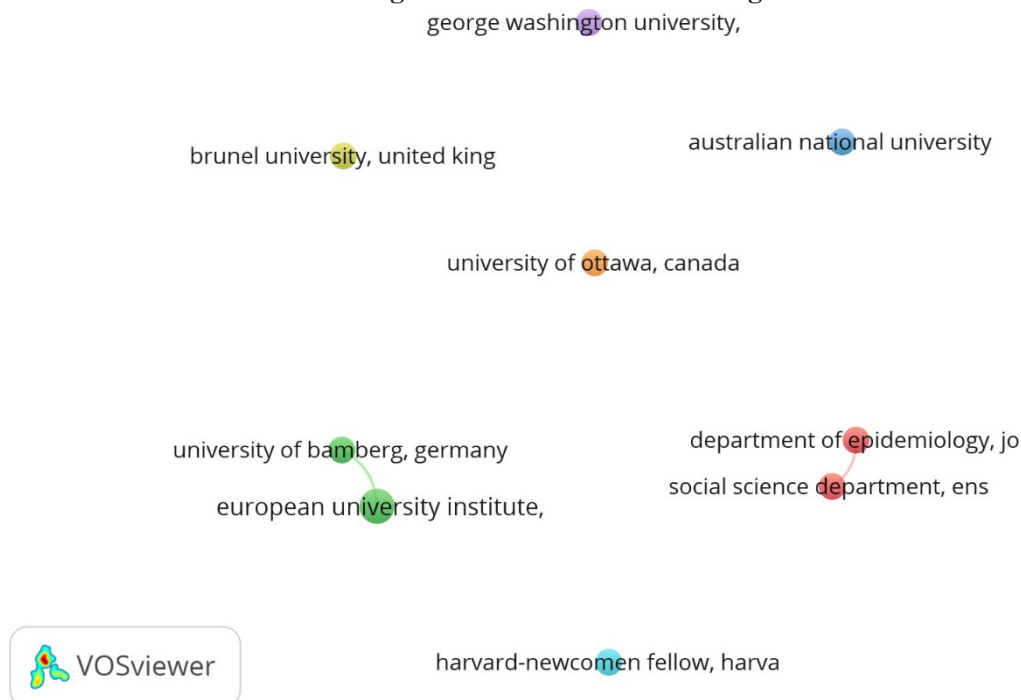
Peringkat	Nama Jurnal/Buku	Dokumen (A)	Kutipan (C)	C/A
1	Social Science and Medicine	2	97	48,5
2	World Development	2	59	29,5
3	Human Rights Quarterly	4	58	14,5
4	Marine Policy	4	47	11,75
5	Reproductive Health	2	34	17
6	Third World Quarterly	2	33	16,5
7	Epidemiology And Psychiatric Sciences	2	32	16
8	International Journal of Drug Policy	2	28	14
9	Orbis	2	27	13,5
10	Sustainability (Switzerland)	2	23	11,5
11	Health And Human Rights	4	19	4,75
12	Global Health Action	2	16	8

Sumber: scopus.com, 2022.

3.1.3 Organisasi Publikasi yang Berpengaruh

Dalam hal organisasi penulis artikel yang diterbitkan dengan topik pelanggaran hak asasi manusia berat sampai dengan tahun 2022, terdapat 677 penulis dari 533 organisasi yang menerbitkan 323 artikel. Keterkaitan antara rekan penulis dari organisasinya masing-masing dengan organisasi lain divisualisasikan oleh VosViewer, seperti terlihat pada Gambar 2. Terdapat sembilan organisasi penulis dengan minimal dua penulis yang memfokuskan penelitiannya pada pelanggaran hak asasi manusia berat. Di antara sembilan organisasi tersebut, dua organisasi terkait yang berkolaborasi dalam penerbitan artikel, yaitu University of Bamberg, Jerman, dengan European University Institute, Italia, yang ditulis oleh Zürn M., Heupel M., dan Department of Epidemiology dengan Social Science Department, Brazil yang ditulis oleh Malta M., Beyrer C.

Gambar 3. Jaringan Penulis Berdasarkan Organisasi



Sumber: diolah oleh penulis, 2022

Departemen Epidemiologi dari John Hopkins Bloomberg School of Public Health adalah organisasi dengan karya yang paling banyak dikutip dengan 116 kutipan pada dua artikel yang diterbitkan, diikuti oleh George Washington University dengan 36 kutipan pada dua artikel yang diterbitkan. Sehubungan dengan jumlah artikel yang diterbitkan, European University Institute dari Italia menempati urutan pertama sebagai organisasi dengan jumlah artikel terbanyak yang diterbitkan dengan topik yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia berat, dengan tiga artikel dan delapan kutipan. Australian National University, Brunel University, dan Departemen Epidemiologi dari Johns Hopkins Bloomberg School Of Public Health menempati urutan kedua bersamaan dengan dua artikel. 9 organisasi penulis teratas yang dikategorikan berdasarkan kutipan dan jumlah publikasi ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 6. 9 Teratas Organisasi Publikasi yang Berpengaruh Berdasarkan Jumlah Artikel

Peringkat	Organisasi	Dokumen (A)	Kutipan (C)	C/A
1	European University Institute, Italia	3	8	2,6667
2	Australian National University, Australia	2	3	1,5
3	Brunel University, Britania Raya	2	1	0,5
4	Department Of Epidemiology, Johns Hopkins Bloomberg School Of Public Health, Baltimore, Md, Amerika Serikat	2	116	58
5	George Washington University, Amerika Serikat	2	36	18
6	Harvard-Newcomen Fellow, Harvard Business School, Soldiers Field, Boston	2	4	2
7	Social Science Department, Ensp/ Fiocruz, Rio De Janeiro, Brazil	2	35	17,5
8	University Of Bamberg, Jerman	2	8	4
9	University Of Ottawa, Kanada	2	7	3,5

Sumber: Scopus, 2022.

Tabel 7. 9 Teratas Organisasi Publikasi yang Berpengaruh Berdasarkan Jumlah Kutipan

Peringkat	Organisasi	Dokumen (A)	Kutipan (C)	C/A
1	Departemen Epidemiologi, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore, Md, Amerika Serikat	2	116	58
2	George Washington University, Amerika Serikat	2	36	18
3	Social Science Department, Ensp/ Fiocruz, Rio De Janeiro, Brazil	2	35	17,5
4	European University Institute, Italia	3	8	2,6667
5	University Of Bamberg, Jerman	2	8	4
6	University Of Ottawa, Kanada	2	7	3,5
7	Harvard-Newcomen Fellow, Harvard Business School, Soldiers Field, Boston, Ma	2	4	2
8	Australian National University, Australia	2	3	1,5
9	Brunel University, Britania Raya	2	1	0,5

Sumber: Scopus, 2022.

3.1.4 Jaringan Kutipan Antar Penulis

Gambar 4. Jaringan Kutipan Berdasarkan Penulis



Sumber: diolah oleh penulis, 2022

Gambar 4 memvisualisasikan kelompok penulis berdasarkan jumlah artikel dengan setidaknya dua karya yang dikutip. Terlihat bahwa tidak terdapat keterikatan antar penulis dalam menerbitkan artikel. Namun demikian, dari segi jumlah karya yang dikutip, Beyrer C. memiliki karya yang paling banyak dikutip dengan 172 kutipan, diikuti oleh Ahmed dengan 37 kutipan, dan Malta M. dengan 35 kutipan. Lebih jelasnya dapat diamati pada tabel berikut ini.

Tabel 8. Penulis Publikasi yang Berpengaruh Berdasarkan Jumlah Artikel

Peringkat	Organisasi	Dokumen (A)	Kutipan (C)	C/A
1	Beyrer C.	4	172	43
2	Augenstein D.	3	16	5,3333
3	Heupel M.	3	28	9,3333
4	Zanotti J.	3	0	0
5	Ahmed R.	2	37	18,5
6	Ballor G.A.	2	4	2
7	Idemudia U.	2	12	6
8	Malta M.	2	35	17,5
9	Partiti E.	2	6	3
10	Russell A.F.S.	2	16	8
11	Simons P.	2	7	3,5
12	Yildirim A.B.	2	4	2

Sumber: Scopus, 2022.

Tabel 9. Penulis Publikasi yang Berpengaruh Berdasarkan Jumlah Kutipan

Peringkat	Organisasi	Dokumen (A)	Kutipan (C)	C/A
1	Beyrer C.	4	172	43
2	Ahmed R.	2	37	18,5
3	Malta M.	2	35	17,5
4	Heupel M.	3	28	9,3333
5	Augenstein D.	3	16	5,3333
6	Russell A.F.S.	2	16	8
7	Idemudia U.	2	12	6
8	Simons P.	2	7	3,5
9	Partiti E.	2	6	3
10	Ballor G.A.	2	4	2
11	Yildirim A.B.	2	4	2
12	Zanotti J.	3	0	0

Sumber: Scopus, 2022.

Berdasarkan data penulis populer yang menerbitkan karyanya dengan topik pelanggaran hak asasi manusia berat, hingga tahun 2022, lebih dari 677 penulis dan rekan penulis menerbitkan karyanya di basis data Scopus. Terdapat 12 penulis dengan setidaknya dua artikel yang diterbitkan terkait dengan topik pelanggaran hak asasi manusia berat. Beyrer menonjol sebagai penulis hak asasi manusia yang paling produktif dan berpengaruh. Empat artikel penting Beyrer membahas peran pemerintah Brazil dalam mengurangi tingkat kasus HIV/AIDS dengan mensubsidi biaya pengobatan HIV/AIDS dan mewajibkan pengobatan HIV/AIDS untuk semua warga negara, dari anak-anak hingga orang tua²⁹. Di satu sisi, negara bertanggung jawab menyediakan layanan kesehatan untuk menekan penyebaran HIV/AIDS. Di sisi lain, mewajibkan anak-anak dan sebagian kelompok masyarakat untuk menyuntikkan narkoba merupakan tanda pelanggaran hak asasi manusia. Artikel Beyrer lainnya juga membahas tentang peran pemerintah yang justru mengabaikan warganya dalam kasus penyakit yang terlanter sekaligus menunjukkan peran aktor non-pemerintah seperti akademisi dan peneliti yang mengadvokasi masyarakat untuk pulih, seperti ditunjukkan di Burma dan Kolombia³⁰. Dalam kasus Burma, keterbatasan pemerintah dalam mengatasi kematian ibu di daerah konflik akibat keterbatasan sumber daya, infrastruktur, dan logistik mengakibatkan kemunculan peran masyarakat lokal dalam mengatasi permasalahan ini dalam bentuk

29 Malta and Beyrer, "The HIV Epidemic and Human Rights Violations in Brazil."

30 Beyrer et al., "Neglected Diseases, Civil Conflicts, and the Right to Health."

Mobile Obstetric Maternal Health Workers (MOM)³¹. Beyrer menulis tentang diskriminasi LGBT di era Covid, ketika pemerintah melihat komunitas LGBT sebagai kelompok rentan dan membatasi semua aktivitas mereka, termasuk penutupan klub malam secara permanen. Adanya pelecehan, pengucilan, penindasan, dan kekerasan pada komunitas LGBT oleh pemerintah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia³².

3.1.5 Artikel Teratas yang Dikutip

Artikel-artikel paling populer terkait dengan penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat ditunjukkan dengan jumlah kutipan terbanyak. Artikel berjudul “Neglected Diseases, Civil Conflicts, and the Right to Health” yang ditulis oleh Beyrer C., Villar J.C., Suwanvanichkij V., Singh S., Baral S.D., Mills E.J. dipublikasikan di Lancet Journal of Public Health. Artikel ini memiliki kutipan tertinggi karena hasil penelitian mengungkap rendahnya peran Pemerintah dalam menanggulangi penyakit menular dan justifikasi politik atas penindasan atas dasar keamanan nasional, seperti yang terjadi di Burma dengan penyakit Filariasis dan di Kolombia dengan demam kuning, penyakit Chagas, dan penyakit leishmaniasis. Selain itu, penelitian ini juga melihat hubungan antara putusan pelanggaran hak asasi manusia dengan penyakit menular dan mematikan. Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan dan rekomendasi, yaitu 1) diperlukan etika dalam penyelenggaraan negara dan pemahaman tentang hak asasi manusia untuk mengatasi tantangan yang berkaitan dengan penyakit dan populasi yang rentan; 2) Kurangnya kesadaran masyarakat akan penyakit menjadi sumber utama penyebaran penyakit sehingga mengancam umat manusia³³. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan rekonsiliasi dan perdamaian antar suku yang difasilitasi oleh pemerintah.

Tabel 10. Artikel yang Berpengaruh

Peringkat	Judul	Kode Penulis	Tahun	Judul Sumber	Total Kutipan	Jenis Dokumen
1	Neglected Diseases, Civil Conflicts, and the Right to health	³⁴	2007	Lancet	94	Artikel
2	The HIV Epidemic and Human Rights Violations in Brazil	³⁵	2013	Journal of the International AIDS Society	23	Artikel
3	With Power Comes Responsibility: Human Rights Protection in United Nations Sanctions Policy	³⁶	2013	European Journal of International Relations	20	Artikel
4	Hide-and-seek in Corporate Disclosure: Evidence from Negative Corporate Incidents	³⁷	2019	Corporate Governance (Bingley)	17	Artikel

31 Katherine C Teela et al., “Social Science & Medicine Community-Based Delivery of Maternal Care in Conflict-Affected Areas of Eastern Burma : Perspectives from Lay Maternal Health Workers Q,” *Social Science & Medicine* 68, no. 7 (2009): 1332–40, <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2009.01.033>.

32 Sara Wallach et al., “HHr Viewpoint Address Exacerbated Health Disparities and Risks to LGBTQ + Individuals during COVID-19” 22, no. 2 (2020): 313–16.

33 Beyrer et al., “Neglected Diseases, Civil Conflicts, and the Right to Health.”

34 Beyrer et al.

35 Malta and Beyrer, “The HIV Epidemic and Human Rights Violations in Brazil.”

36 Heupel, “With Power Comes Responsibility: Human Rights Protection in United Nations Sanctions Policy.”

37 Bradley Rudkin et al., “Hide-and-Seek in Corporate Disclosure: Evidence from Negative Corporate Incidents,” *Corporate Governance (Bingley)* 19, no. 1 (2019): 158–75, <https://doi.org/10.1108/CG-05-2018-0164>.

Peringkat	Judul	Kode Penulis	Tahun	Judul Sumber	Total Kutipan	Jenis Dokumen
5	Incorporating Social Rights in Development: Transnational Corporations and The Right to Water	³⁸	2011	International Journal of Law in Context	16	Artikel
6	Analysis of the Canadian National Corporate Social Responsibility Strategy: Insights and Implications	³⁹	2018	Corporate Social Responsibility and Environmental Management	12	Artikel
7	Negotiating the Hard/Soft Law Divide in Business and Human Rights: The Implementation of the UNGPs in the European Union	⁴⁰	2018	Global Policy	9	Artikel
8	Selectivity in Law-Making: Regulating Extraterritorial Environmental Harm and Human Rights Violations by Transnational Extractive Corporations	⁴¹	2015	Research Handbook on Human Rights and the Environment	5	Bab buku
9	Curbing supply-chain human rights violations through trade and due diligence. Possible WTO concerns raised by the EU conflict minerals regulation	⁴²	2017	Journal of World Trade	5	Artikel

³⁸ Russell, *Incorporating Social Rights in Development: Transnational Corporations and the Right to Water*.

³⁹ Idemudia and Kwakyewah, "Analysis of the Canadian National Corporate Social Responsibility Strategy: Insights and Implications."

⁴⁰ Augenstein, "Negotiating the Hard/Soft Law Divide in Business and Human Rights: The Implementation of the UNGPs in the European Union."

⁴¹ Simons, "Selectivity in Law-Making: Regulating Extraterritorial Environmental Harm and Human Rights Violations by Transnational Extractive Corporations."there has been little effort to tackle in any concerted or effective way the environmental and human rights impacts of transnational corporations (TNCs

⁴² Partiti and van Der Velde, "Curbing Supply-Chain Human Rights Violations through Trade and Due Diligence. Possible WTO Concerns Raised by the EU Conflict Minerals Regulation."tantalum and tungsten, their ores, and gold originating from conflictaffected and high-risk (CAHR

Peringkat	Judul	Kode Penulis	Tahun	Judul Sumber	Total Kutipan	Jenis Dokumen
10	Multinational Corporations and the Politics of International Trade in Multidisciplinary Perspective	⁴³	2020	Business and Politics	5	Artikel

Sumber: Scopus, 2022.

Tabel 10 menunjukkan daftar sepuluh artikel dengan jumlah kutipan tertinggi terkait penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat. Artikel berjudul “Neglected diseases, civil conflicts, and the right to health” dari The Lancet of Public Health memiliki jumlah kutipan terbanyak, dengan total 94 kutipan. Artikel ini membahas tentang kebijakan pengelolaan kesehatan dan peran pemerintah dalam kaitannya dengan konflik antar etnis yang menjadi awal penyebaran penyakit menular. Hasil penelitian menunjukkan rendahnya peran pemerintah dalam penanganan penyakit menular dan adanya justifikasi politik untuk melakukan kekerasan terhadap penderita penyakit. Artikel “The HIV Epidemic and Human Rights Violations in Brazil” yang ditulis oleh Malta dan Bayrer dari Journal of the International AIDS Society berada di posisi kedua dengan total 23 kutipan. Artikel ini melihat kebijakan pemaksaan dan tindakan kekerasan terhadap pengguna narkoba oleh pemerintah dibandingkan dengan kebijakan penjara yang telah mengurangi kasus HIV dan narkoba di Brazil.

Artikel pada posisi ketiga adalah “With Power Comes Responsibility: Human Rights Protection in United Nations Sanctions Policy” dari European Journal of International Relations, dengan total 20 kutipan. Artikel tersebut menyoroti perkembangan mekanisme perlindungan terhadap pelanggaran hak asasi manusia oleh organisasi internasional, menggeser peran negara yang dianggap tradisional. Dengan mengangkat beberapa kasus Dewan Keamanan dan Uni Eropa, artikel tersebut merekomendasikan perlunya melembagakan keterlibatan organisasi internasional dalam perlindungan terhadap pelanggaran hak asasi manusia nasional. Beberapa artikel sebelumnya menunjukkan hubungan antara penyakit menular, penyakit yang terabaikan, kondisi sosial dalam masyarakat, dan peran aktor pemerintah dan non-pemerintah dalam memerangi penyakit ini. Bahkan peran pemerintah yang dominan berpotensi mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia.

Artikel paling berpengaruh yang terjaring dalam pencarian juga menunjukkan informasi yang berbeda dengan definisi pelanggaran hak asasi manusia berat. Sebagian besar pasal yang terjaring menjelaskan kegagalan negara dalam menjamin hak asasi manusia dan pelanggaran hak asasi manusia oleh negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah yang ditujukan pada kondisi penyakit dan status masyarakat belum menggambarkan kondisi pelanggaran hak asasi manusia berat yang terjadi di Indonesia yang mayoritas terjadi karena gerakan separatisme, aliran keagamaan yang dianggap sesat oleh pemerintah, dan konflik antara warga dan pemerintah karena berbau SARA.

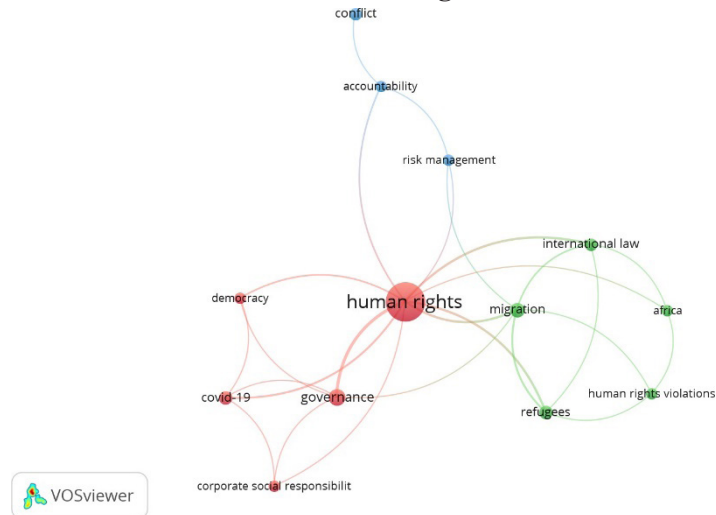
Berdasarkan 10 artikel teratas yang muncul, pelanggaran hak asasi manusia berat tampak sebagai lemahnya peran -jika bukan karena kegagalan- peran pemerintah dalam menangani permasalahan sosial berskala besar seperti penyakit menular, HIV/AIDS, korban perang, dan pengungsi. Hasilnya sedikit berbeda dengan definisi pelanggaran hak asasi manusia berat yang diberikan oleh WCHR Wina. Munculnya definisi-definisi yang berbeda-beda ini mungkin disebabkan oleh kompleksitas istilah pelanggaran hak asasi manusia berat itu sendiri, apalagi unsur-unsur di dalamnya, seperti perlakuan yang merendahkan atau penyerangan yang sistematis. Lebih lanjut, konsep pelanggaran hak asasi manusia berat diinterpretasikan secara beragam di kalangan pakar hak asasi manusia. Beberapa lembaga atau peneliti menggunakan istilah yang berbeda yang mengacu pada pelanggaran hak asasi manusia berat, seperti pelanggaran hak asasi manusia yang masif, pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis, atau pelanggaran hak asasi manusia yang mencolok. Bagian selanjutnya dari artikel ini membahas beberapa kata kunci yang muncul bersamaan dengan pelanggaran hak asasi manusia berat.

⁴³ Ballor and Yildirim, “Multinational Corporations and the Politics of International Trade in Multidisciplinary Perspective.”

3.1.6 Analisis Kata Kunci

Pemetaan pasal-pasal terkait penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat yang dipublikasikan hingga tahun 2022 diilustrasikan dalam kelompok kata kunci yang ditandai dengan warna dan jumlah node yang berbeda. Gambar nomor 4 menunjukkan bahwa berdasarkan kejadian bersama kata kunci penulis, dengan kata kunci “Hak Asasi Manusia” menonjol dibandingkan dengan kata lain. Visualisasi berdasarkan hasil analisis menggunakan VosViewer, semakin lebar ukuran lingkaran maka kata kunci tersebut akan semakin sering muncul. Kata kunci dengan warna yang sama menunjukkan bahwa mereka berada pada kelompok yang sama dan terkait erat dengan kata kunci lainnya.

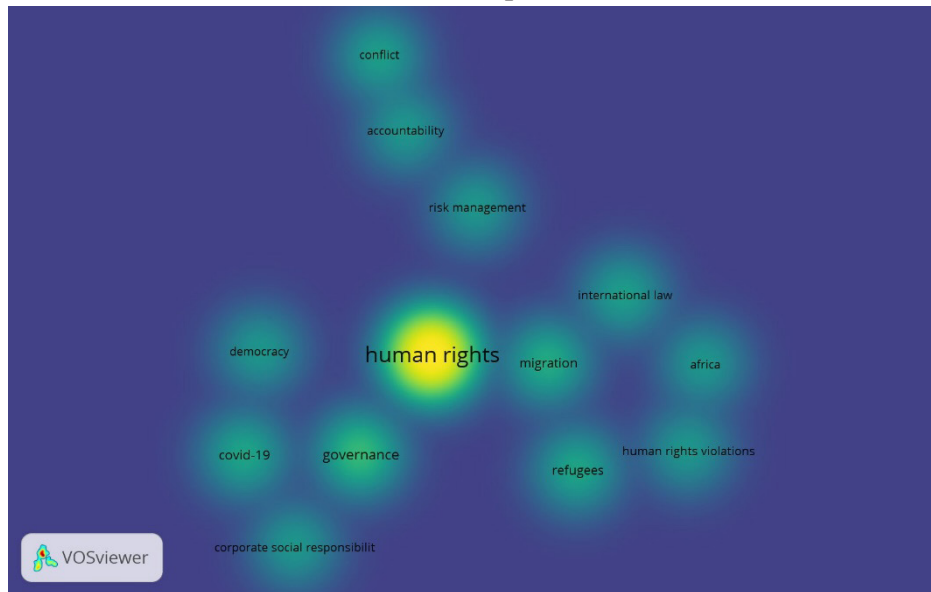
Gambar 5. Visualisasi Jaringan Kata Kunci



Sumber: diolah oleh penulis, 2022

Gambar tersebut menunjukkan bahwa terdapat 3 kelompok, dimana kelompok pertama ditandai dengan lima simpul berwarna merah yang berfokus pada hak asasi manusia, tata kelola, demokrasi, Covid 19, dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Kelompok pertama, ditandai dengan garis yang lebih tebal, menggambarkan hubungan antara hak asasi manusia dan pemerintahan. Hal ini menunjukkan pentingnya tata kelola dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia. Menurut penelitian Nuckols & Sosa, dan Bartunek, penanganan pelanggaran hak asasi manusia akhir-akhir ini tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh negara tetapi membutuhkan keterlibatan aktor masyarakat dan aktor non negara untuk mewujudkan advokasi kolaboratif. Oleh karena pelanggaran hak asasi manusia selalu ditangani melalui pengadilan, keadaan ini menjadi baru. Beberapa peneliti telah mengungkapkan bahwa mengembangkan solusi pelanggaran hak asasi manusia melalui mekanisme non-yudisial atau kolaborasi dapat dilakukan melalui kolaboratif advokat yang dilakukan oleh pemerintah dengan masyarakat adat di Hutan Amazon berhadapan dengan perusahaan multinasional, advokasi kolaboratif untuk melindungi warga sipil yang terkena dampak konflik seperti di Suriah, Yaman, Sudan Selatan, dan Myanmar, dan melalui peran organisasi masyarakat sipil untuk mengadakan pertemuan-pertemuan konsultatif. Pada kelompok yang sama, pentingnya demokrasi dalam melindungi dan menegakkan hak asasi manusia karena demokrasi adalah sistem politik yang menghargai hak asasi manusia. Perjuangan mempertahankan demokrasi adalah upaya umat manusia untuk menjamin dan melindungi hak asasi manusianya. Kelompok kedua ditandai dengan lima simpul berwarna hijau yang berfokus pada hukum internasional, imigrasi, pengungsi, Afrika, dan pelanggaran hak asasi manusia. Kelompok ketiga ditandai dengan tiga simpul berwarna biru yang berfokus pada manajemen risiko, akuntabilitas, dan konflik. Hasil penelitian ini diilustrasikan dengan visualisasi overlay berdasarkan kejadian bersama dengan kata kunci penulis. Gambar 5 adalah jaringan kepadatan yang menunjukkan tingkat penelitian berdasarkan kejadian bersama dengan kata kunci penulis. Semakin pekat warna pada kata kunci tertentu menunjukkan relevansi penelitian yang dilakukan pada kata kunci tersebut.

Gambar 6. Visualisasi Kepadatan Kata Kunci



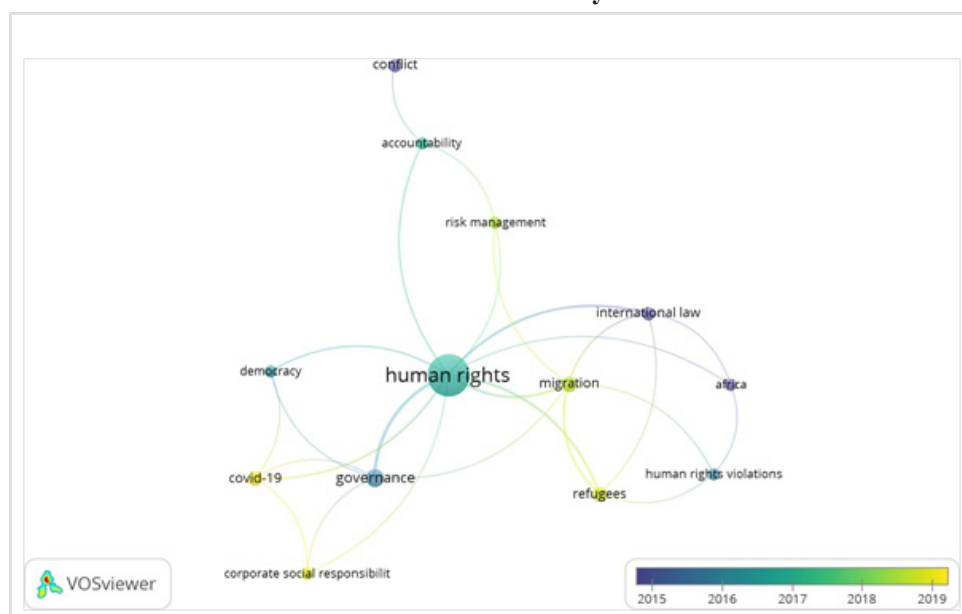
Sumber: diolah oleh penulis, 2022

Gambaran di atas menunjukkan bahwa penelitian terkait pelanggaran hak asasi manusia berat yang dilakukan hingga tahun 2022 sebagian besar menggunakan kata kunci hak asasi manusia. Tidak ada topik yang diteliti dengan banyak kata kunci kecuali dengan memasukkan kata kunci hak asasi manusia dalam penelitian tersebut.

3.2 Pola Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat

Sebelum tahun 2010, pelanggaran hak asasi manusia berat ditangani secara yudisial atau melalui pengadilan di berbagai negara di seluruh dunia. Hal ini disebabkan korban yang terkena dampak terus menuntut agar para pelaku pelanggaran hak asasi manusia diadili dan dihukum sesuai dengan putusan hakim. Selain itu, tekanan dari komunitas internasional diterapkan pada negara-negara yang memiliki kasus untuk menyelidiki pelaku pelanggaran hak asasi manusia berat.

Gambar 7. Visualisasi Overlay Kata Kunci



Sumber: diolah oleh penulis, 2022

Sementara itu, istilah tata kelola muncul dalam pelanggaran hak asasi manusia berat sejak 2015 (lihat Gambar 7). Tata kelola dalam pelanggaran hak asasi manusia berat dilakukan melalui proses rekonsiliasi antara korban yang terkena dampak dan pemerintah, yang mencakup pemenuhan semua persyaratan korban kejahatan sebelumnya, termasuk situasi sosial, psikologis, ekonomi, dan lingkungan. Beberapa analis percaya bahwa hal ini dapat dicapai melalui prosedur non-yudisial, termasuk kerjasama antara pemerintah dan pihak non-pemerintah.

Di satu sisi, kolaborasi muncul dari tujuan bersama pemerintah dan entitas non-negara untuk menangani permasalahan secepat mungkin. Namun demikian, karena tidak semua pelaku yang terlibat memiliki sumber daya yang sama, diperlukan prosedur kolaboratif untuk membatasi bahaya para aktor yang terlibat dalam advokasi. Akibatnya, beberapa profesional menyebut metode kerja tim ini sebagai advokasi kolaboratif atau pengacara kolaboratif.

Gambar 7 menunjukkan kecenderungan yang berbeda dalam publikasi yang berkaitan dengan hak asasi manusia dimana tata kelola hak asasi manusia telah dipelajari sejak tahun 2015. Sementara itu, penelitian terbaru yang berkaitan dengan hak asasi manusia selalu dikaitkan dengan pengungsi dan pandemi covid-19. Di sisi lain, hukum internasional, konflik, dan Afrika menjadi topik yang terkemuka pada tahun 2015-2016. Selain itu, gambar 7 menunjukkan bahwa penelitian terkait hak asasi manusia, isu pengungsi, Covid-19, dan kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan topik yang muncul di tahun 2019 hingga saat ini, yang ditandai dengan simpul kuning. Tampaknya penelitian terbaru yang menghubungkan kebijakan CSR dengan Covid-19 telah dilakukan. Selama pandemi Covid-19, inisiatif CSR menyebabkan pertumbuhan modal psikologis pekerja dan meningkatkan persepsi keamanan manajemen perusahaan.

Oleh karena itu, beberapa hotel kelas premium dan menengah mengeluarkan kebijakan CSR bagi masyarakat, staf, dan pelanggan selama wabah Covid-19 untuk memitigasi dampak negatif pandemi yang mengakibatkan potensi pelanggaran hak asasi manusia.

Sementara itu, belum ada penelitian hak asasi manusia yang mengaitkan kebijakan CSR dengan pengelolaan pengungsi. Penelitian hak asasi manusia terkait pengungsi hanya terkait hukum internasional (2015), migrasi (2018), dan pelanggaran hak asasi manusia (2019).

Selain itu, tidak ada satu pun artikel yang disaring membahas pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia. Hal ini tidak berarti belum ada penelitian terkait pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia. Rumitnya istilah yang digunakan dalam pelanggaran hak asasi manusia berat mengakibatkan kemungkinan tidak terjangkanya pasal-pasal yang membahas pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia.

4. Kesimpulan

Hingga tahun 2022, penelitian yang berfokus pada penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat telah tumbuh secara signifikan. Amerika Serikat menjadi negara dengan jumlah publikasi terbanyak. Selain itu, Departemen Epidemiologi, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore, Md, Amerika Serikat, merupakan organisasi yang paling banyak memberikan perhatian dan pengaruh terhadap isu penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat. Selain itu, Social Science and Medicine merupakan penerbit jurnal yang sangat fokus pada isu penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat. Berdasarkan jumlah publikasinya, Profesor C. Beyrer dari Amerika Serikat memiliki jumlah publikasi terbanyak dan merupakan peneliti paling berpengaruh terkait topik penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat. Berdasarkan visualisasi kepadatan, penelitian tentang pelanggaran hak asasi manusia masih menjadi topik penelitian yang relevan hingga saat ini. Berdasarkan visualisasi kejadian bersama dan overlay tersebut, dapat dilakukan penelitian ke depan terkait hak asasi manusia dengan fokus pada kebijakan CSR dalam penanganan pengungsi. Selain itu, penelitian terkait penanganan pelanggaran hak asasi manusia melalui mekanisme non yudisial menarik untuk dilakukan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, khususnya analisis bibliometrik terkait topik pelanggaran hak asasi manusia berat terbatas pada basis data Scopus. Meskipun basis data Scopus merupakan salah satu basis data terbesar terkait dengan literatur ilmiah, sangat mungkin basis data tersebut tidak mencakup semua literatur yang ada terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia berat. Selain itu, artikel ini merekomendasikan perlunya lebih banyak tulisan tentang pelanggaran hak asasi manusia berat di Indonesia dari berbagai perspektif. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya juga menyertakan basis data lain, seperti Web of Science atau Google Scholar, untuk tinjauan literatur yang lebih komprehensif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah memberikan akses literatur.

DAFTAR PUSTAKA

- Achwan, Rochman, Meuthia Ganie-Rochman, Andi Rahman Alamsyah, and Lidya Triana. "University Reform and the Development of Social Sciences in Indonesia." *International Journal of Educational Development* 78, no. August (2020): 102269. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2020.102269>.
- Ali, Mukti. "Perbandingan Konsep Negara Hukum." *Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian*, 2020, 1–32.
- Amahazion, Fikre Jesus. "Human Trafficking: The Need for Human Rights and Government Effectiveness in Enforcing Anti-Trafficking." *Global Crime* 16, no. 3 (2015): 167–96. <https://doi.org/10.1080/17440572.2015.1019613>.
- Amiruddin, Amiruddin. "Komnas HAM , Investigating Serious Human Rights Violations : Dynamics and Challenges." *Journal of Southeast Asian Human Rights* 5, no. December (2021): 244–54. <https://doi.org/10.19184/jseahr>.
- Ansell, Chris, and Alison Gash. "Collaborative Platforms as a Governance Strategy." *Journal of Public Administration Research and Theory* 28, no. 1 (2018): 16–32. <https://doi.org/10.1093/jopart/mux030>.
- Augenstein, Daniel. "Negotiating the Hard/Soft Law Divide in Business and Human Rights: The Implementation of the UNGPs in the European Union." *Global Policy* 9, no. 2 (2018): 254–63. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.12530>.
- Baas, Jeroen, Michiel Schotten, Andrew Plume, Grégoire Côté, and Reza Karimi. "Scopus as a Curated, High-Quality Bibliometric Data Source for Academic Research in Quantitative Science Studies." *Quantitative Science Studies* 1, no. 1 (2020): 377–86. https://doi.org/10.1162/qss_a_00019.
- Ballor, Grace A., and Aydin B. Yildirim. "Multinational Corporations and the Politics of International Trade in Multidisciplinary Perspective." *Business and Politics* 22, no. 4 (2020): 573–86. <https://doi.org/10.1017/bap.2020.14>.
- Bartunek, Jean M, Pennie G. Foster-Fishman, and Christopher B. Keys. "Using Collaborative Advocacy to Foster Intergroup Cooperation: A Joint Insider-Outsider Investigation." *Human Relations* 49, no. 6 (1996).
- Beyrer, Chris, Juan Carlos Villar, Voravit Suwanvanichkij, Sonal Singh, Stefan D Baral, and Edward J Mills. "Neglected Diseases, Civil Conflicts, and the Right to Health." *Lancet* 370, no. August 2018 (2007): 521–27.
- Contesse, Jorge. "Settling Human Rights Violations." *Harvard International Law Journal* 60, no. 2 (2019): 317–75.
- Davidson, Lorna, and Raj Purohitt. "Note from the Field The Zimbabwean Human Rights Crisis : A Collaborative Approach to International Advocacy," no. February 2004 (2003): 1–24.
- Elsevier. "Discover Why the World's Leading Researchers and Organizations Choose Scopus," 2022. <https://www.elsevier.com/solutions/scopus/why-choose-scopus#:~:text=Scopus helps%3A,bolster performance%2C rank%2C and reputation>.
- Eck, Nees Jan van, and Ludo Waltman. "Software Survey : VosViewer, a Computer Program for Bibliometric Mapping." *Scientometrics*, no. 84 (2010): 523–38. <https://doi.org/10.1007/s11192-009-0146-3>.
- Ekpa, Simon. "Human Rights Violation." SSRN, 2016. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2738447>.
- Englehart, Neil A. "State Capacity, State Failure, and Human Rights." *Journal of Peace Research* 46, no. 2 (2009): 163–80. <https://doi.org/10.1177/0022343308100713>.
- Filimonau, Viachaslau, Belen Derqui, and Jorge Matute. "The COVID-19 Pandemic and Organisational Commitment of Senior Hotel Managers." *International Journal of Hospitality Management* 91, no. August (2020): 102659. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102659>.
- Hamidah, Ida, Sriyono, and Muhammad Nur Hudha. "A Bibliometric Analysis of Covid-19 Research Using VosViewer." *Indonesia Journal of Science & Technology* 5, no. 2 (2020): 209–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.17509/ijost.v5i2.24522>.

- Hariharan, E, and S Tharika. "Gross Human Rights Violation-The Enforcement Challenge." *International Journal of Law Management & Humanities* 1, no. 5 (2018): 2581–5369. www.ijlmh.com.
- Heupel, Monika. "With Power Comes Responsibility: Human Rights Protection in United Nations Sanctions Policy." *European Journal of International Relations* 19, no. 4 (2013): 773–96. <https://doi.org/10.1177/1354066111426621>.
- Idemudia, Uwafiokun, and Cynthia Kwakyewah. "Analysis of the Canadian National Corporate Social Responsibility Strategy: Insights and Implications." *Corporate Social Responsibility and Environmental Management* 25, no. 5 (2018): 928–38. <https://doi.org/10.1002/csr.1509>.
- International Commission of Jurists. "Civil Remedies for Gross Human Rights Violations." *International Commission of Jurists*. Geneva, 2018. <https://doi.org/10.4324/9781315203454-19>.
- International Commission of Jurists (ICJ). "Achieving Justice for Gross Human Rights Violations in Cambodia Baseline Study, October 2017." Geneva, 2017.
- Karimova, Takhmina. "What Amounts to 'a Serious Violation of International Human Rights Law'? An Analysis of Practice and Expert Opinion for the Purpose of the 2013 Arms Trade Treaty." Geneva, 2014. <https://repository.graduateinstitute.ch/record/295203>.
- Li, Huiru, Xinyi Liu, Hengli Zhou, and Zhiyong Li. "Research Progress and Future Agenda of COVID-19 in Tourism and Hospitality : A Timely Bibliometric Review," no. 2019 (2022). <https://doi.org/10.1108/IJCHM-04-2022-0424>.
- Liwanga, Roger-Claude. "The Meaning of Gross Violation of Human Rights: A Focus on International Tribunals' Decisions over the DRC Conflicts." *Denver Journal of International Law & Policy* 44, no. 1 (2015): 67–81.
- Loan, Fayaz Ahmad, and Refhatunnisa Shah. "Research Output on Terrorism by India and Pakistan : ABibliometric Study." *Collection and Curation*, 2017. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/CC-01-2017-0004>.
- Luqman, Yanuar. "Content Analysis on Energy Issue in Kompas Daily." *Komunikator* 11, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.18196/jkm.111020>.
- MacNaughton, Gillian, and Mariah McGill. "Economic and Social Rights in the United States : Implementation Without Ratification Universal Declaration of Human Rights , Which Has since Become." *Northeastern University Law Journal* 4, no. 2 (2012): 365–406.
- Malta, Monica, and Chris Beyrer. "The HIV Epidemic and Human Rights Violations in Brazil." *Journal of the International AIDS Society* 16, no. March (2013): 10–12. <https://doi.org/10.7448/IAS.16.1.18817>.
- Mao, Yan, Jie He, Alastair M. Morrison, and J. Andres Coca-Stefaniak. "Effects of Tourism CSR on Employee Psychological Capital in the COVID-19 Crisis: From the Perspective of Conservation of Resources Theory." *Current Issues in Tourism* 24, no. 19 (2021): 2716–34. <https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1770706>.
- Metcalf-hough, Victoria. "Collaborative Advocacy between Humanitarian and Human Rights Actors Opportunities and Challenges," no. October (2021).
- Nuckolls, Raylinn, and Leticia Villarreal Sosa. "Human Rights, Collaborative Advocacy, and a Global Approach to Practice: Lessons from a Field Experience in Indonesia." *Journal of Human Rights and Social Work* 6, no. 1 (2021): 82–89. <https://doi.org/10.1007/s41134-020-00149-7>.
- Partiti, Enrico, and Steffen van Der Velde. "Curbing Supply-Chain Human Rights Violations through Trade and Due Diligence. Possible WTO Concerns Raised by the EU Conflict Minerals Regulation." *Journal of World Trade* 51, no. 6 (2017): 1043–68.
- Putera, Prakoso Bhairawa, Suryanto Suryanto, Sinta Ningrum, and Ida Widianingsih. "A Bibliometric Analysis of Articles on Innovation Systems in Scopus Journals Written by Authors from Indonesia, Singapore, and Malaysia." *Science Editing* 7, no. 2 (2020): 177–83. <https://doi.org/https://doi.org/10.6087/kcse.214>.
- Rasva, Marii, and Evelin Jürgenson. "Europe ' s Large-Scale Land Acquisitions and Bibliometric Analysis," 2022.
- Rudkin, Bradley, Danson Kimani, Subhan Ullah, Rizwan Ahmed, and Syed Umar Farooq. "Hide-and-Seek in Corporate Disclosure: Evidence from Negative Corporate Incidents." *Corporate Governance (Bingley)* 19, no. 1 (2019): 158–75. <https://doi.org/10.1108/CG-05-2018-0164>.

- Russell, Anna F.S. *Incorporating Social Rights in Development: Transnational Corporations and the Right to Water. International Journal of Law in Context*. Vol. 7, 2011. <https://doi.org/10.1017/S1744552310000388>.
- Samendawai, Abdul Haris. "Rights of Gross Human Rights Violation Victims (International and National Law Perspective)." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 16, no. 2 (2009). <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/537>.
- Setiawan, Dony. "Ombudsman Finds Maladministration in Talangsari Massacre 'Peace Declaration.'" *The Jakarta Post*, 2019. <https://www.thejakartapost.com/news/2019/12/06/ombudsman-finds-maladministration-in-talangsari-massacre-peace-declaration.html>.
- Severo, Priscilla Paola, Leonardo B Furstenau, Michele Kremer Sott, Danielli Cossul, Mariluza Sott Bender, and Nicola Luigi Bragazzi. "Thirty Years of Human Rights Study in the Web of Science Database (1990 – 2020)." 2021.
- Simons, Penelope. "Selectivity in Law-Making: Regulating Extraterritorial Environmental Harm and Human Rights Violations by Transnational Extractive Corporations." In *Research Handbook on Human Rights and the Environment*, 473–507, 2015. <https://doi.org/10.4337/9781782544432.00034>.
- Sumigar, Bernhard Ruben Fritz. "Pelanggaran Berat HAM Dalam RUU KUHP: Tinjauan Dari Hukum Internasional (Gross Violations of Human Rights in the Criminal Code Bill: An Overview from International Law)." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 11, no. 2 (2020): 125–44. <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1639>.
- Sweileh, Waleed M., Samah W. Al-Jabi, Ansam F. Sawalha, Adham S. AbuTaha, and Sa'ed H. Zyoud. "Bibliometric Analysis of Publications on Campylobacter: (2000-2015)." *Journal of Health, Population, and Nutrition* 35, no. 1 (2016): 35–39. <https://doi.org/10.1186/s41043-016-0076-7>.
- Sweileh, Waleed M. "A Bibliometric Analysis of Global Research Output on Health and Human Rights (1900 – 2017)." *Global Health Research and Policy* 3, no. 30 (2018): 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s41256-018-0085-8>.
- . "Bibliometric Analysis of Peer-Reviewed Literature in Transgender Health (1900 – 2017)." *BMC International Health and Human Rights* 18, no. 16 (2018): 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.1186/s12914-018-0155-5>.
- Teela, Katherine C, Luke C Mullany, Catherine I Lee, Eh Poh, Palae Paw, Nicole Masenior, Cynthia Maung, Chris Beyrer, and Thomas J Lee. "Social Science & Medicine Community-Based Delivery of Maternal Care in Conflict-Affected Areas of Eastern Burma : Perspectives from Lay Maternal Health Workers Q." *Social Science & Medicine* 68, no. 7 (2009): 1332–40. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2009.01.033>.
- Vahlsing, Marissa, and Benjamin Hoffman. "Collaborative Lawyering in Transnational Human Rights Advocacy." *Clinical Law Review*, 2014, 1–28.
- Wallach, Sara, Alex Garner, Sean Howell, Tyler Adamson, Stefan Baral, and Chris Beyrer. "HHr Viewpoint Address Exacerbated Health Disparities and Risks to LGBTQ + Individuals during COVID-19" 22, no. 2 (2020): 313–16.
- WCHR. "World Conference on Human Rights, Vienna Declaration and Programme of Action." Vienna, 1993.
- Widianingsih, Ida, Caroline Paskarina, Riswanda Riswanda, and Prakoso Bhairawa Putera. "Evolutionary Study of Watershed Governance Research: A Bibliometric Analysis." *Science and Technology Libraries* 40, no. 4 (2021): 416–34. <https://doi.org/10.1080/0194262X.2021.1926401>.
- Xinhua. "The Report on Human Rights Violations in the United States in 2021." SCIO Republic of China, 2022. http://english.scio.gov.cn/m/scionews/2022-02/28/content_78076572.htm.

Pernyataan Penulis:

Kontribusi Penulis - Iwan Santoso: *Draf Tulisan Asli, Konseptualisasi, Sumber.* **Murtir Jeddawi:** *Peninjauan dan Penyuntingan Tulisan.* **Yana Sahyana:** *Draf Tulisan Asli.* **Romli Arsyad:** *Peninjauan dan Penyuntingan Tulisan.* **Alma'arif:** *Konseptualisasi, Metodologi, Sumber, Visualisasi.*

Benturan Kepentingan - Para penulis yang namanya tercantum menyatakan bahwa mereka TIDAK berafiliasi dengan atau terlibat dalam organisasi atau entitas apa pun terhadap kepentingan keuangan apa pun (seperti honorarium; hibah pendidikan; partisipasi dalam biro pembicara; keanggotaan; pekerjaan, konsultasi, kepemilikan saham, atau kepentingan ekuitas lainnya; dan kesaksian ahli atau pengaturan lisensi paten), atau kepentingan non-keuangan (seperti hubungan pribadi atau profesional, afiliasi, pengetahuan atau kepercayaan) dalam pokok bahasan atau materi yang dibahas dalam manuskrip ini.

Pernyataan Keaslian – Penulis terkait menyatakan bahwa manuskrip ini asli dan publikasinya tidak melanggar hak cipta apa pun; naskah belum pernah dipublikasikan sebelumnya, seluruhnya atau sebagian di jurnal lain atau perusahaan penerbitan ilmiah; naskah tidak berpartisipasi dalam proses penerbitan lainnya; semua orang yang tercantum selanjutnya berkomitmen dalam pembuatan makalah dan mendapatkan informasi mengenai partisipasinya.

